

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA RSUD MASSENREMPULU
KABUPATEN ENREKANG**



Disusun Oleh :

**SUMARNI S.
2014.235.00.129**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
RSUD MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

SUMARNI S.

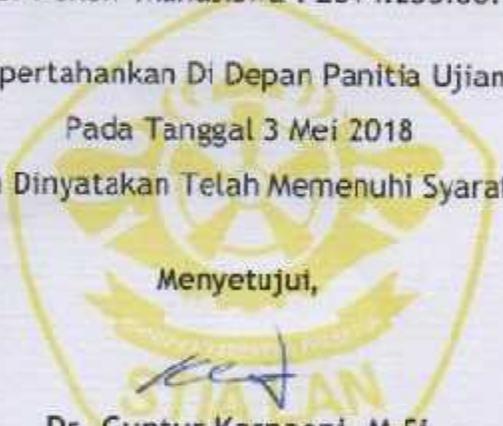
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.129

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 3 Mei 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,



Dr. Guntur Karnaeni, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

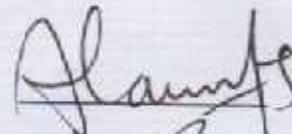
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
RSUD MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG**

Pada hari ini, Kamis, 3 Mei 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama Sumarni S dengan Nomor Pokok 2014.235.00.129

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menandatangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si



Sekretaris : Erni Cahyani Ibrahim, SE, Ak, MM



Anggota : Dr. Guntur Karnaeni, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 03 Mei 2018

Yang menyatakan,



JUMANT, S.
NPM. 2014.231.00.129

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan. Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang”**.

Dalam kurung waktu penulisan terdapat banyak hambatan, tantangan dan masalah dalam menyiapkan skripsi ini namun dapat terselesaikan. Semua tak lepas berkat dukungan Dr. Guntur Karnaeni, M.Si selaku pembimbing yang membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran yang membangun serta dukungan dari orang-orang terdekat, karib kerabat dan orang-orang sekitar sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Maka ijinkan penulis terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda Abdul Samad dan ibunda tercinta Hanariah terimakasihku atas doa, dorongan, semangat dan bantuan yang diberikan dengan apapun selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Amir Imbaruddin, MDA.,Ph.D selaku Ketua STIA – LAN Makassar yang telah memberikan ijin dan arahan yang baik sehingga penulis memperoleh ilmu yang banyak dan pendidikan yang baik selama di kampus STIA-LAN Makassar.
3. Dr. Guntur Karnaeni, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

4. Drs.H. Muslimin Bando, M.Pd selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang telah mendukung dan memberikan izin Belajar selama perkuliahan.
5. Direktur RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang dr. H.M. Yusuf. KS, terima kasih atas segala bantuan dukungan selama penulis mengadakan penelitian.
6. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi atas ijin untuk meneliti dan saran yang diberikan sehingga semakin membuka wawasan dan pemikiran selama menulis skripsi ini.
7. Suami dan anak tersayang yang telah mendukung saya selama ini mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini
8. Teman - teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, kebaikan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Enrekang, 01 Maret 2018

Penulis

INTISARI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RSUD MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Sumarni S

Penasehat : Dr. Guntur Karnaeni, M.Si

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara membawa konsekuensi tentang pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pada laporan keuangan, serta adanya pernyataan *governmental accounting standard board* bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan yang menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument utama dalam penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menunjang keterangan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian.

Hasil penelitian didasarkan pada tiga sub variabel yaitu penyajian dan pengungkapan, integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Berdasarkan hasil analisis penyajian dan pengungkapan masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,11, integritas keuangan dengan nilai 3,86 termasuk dalam kategori baik serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,37. Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan nilai rata –rata keseluruhan sub variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 4,11. Sehingga sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang berada pada rentang interval sangat baik.

Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
INTISARI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	8
2. Akuntabilitas Administrasi.....	19
3. Akuntabilitas Keuangan	22
B. Hasil Penelitian yang Relevan	27
C. Defenisi Operasional.....	29
D. Kerangka Pikir	31
E. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Desain Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian	40
B. Karakteristik Responden	44
C. Deskripsi Data dan Analisis Data	47
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	72
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	72
1. Penyajian dan pengungkapan.....	73
2. Integritas Keuangan	74

3. Ketaatan Terhadap Peraturan	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DARTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Defenisi Operasional	30
Tabel 2 : Skala pengukuran akuntabilitas keuangan menggunakan Skala Liker ..	38
Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan	46
Tabel 7 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Mencakup Semua Transaksi Yang Terjadi	48
Tabel 8 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Dapat Dibandingkan / Andal.....	48
Tabel 9 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Bebas Dari Kesalahan Material	49
Tabel 10 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Menyajikan Informasi Keuangan Lengkap	50
Tabel 11 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Penyajian dan Pengungkapan.....	50
Tabel 12 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Menjadi Tolak Ukur Kebutuhan Para Pengguna.....	57
Tabel 13 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Lengkap	58
Tabel 14 : Pernyataan Responden Mengenai Pelaporan Realisasi Pendapatan Tepat Waktu	61
Tabel 15 : Pernyataan Responden Mengenai Pelaporan Realisasi Belanja Tepat Waktu.....	61
Tabel 16 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Integitas Keuangan	64
Tabel 17 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	65
Tabel 18 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan di Review Oleh Inspektorat	66

Tabel 19 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan di Audit Oleh BPK	69
Tabel 20 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - Undangan.....	69
Tabel 21 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas Keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	32
Gambar 2 : Laporan Realisasi Anggaran	52
Gambar 3 : Laporan Perubahan Ekuitas	53
Gambar 4 : Laporan Operasional	55
Gambar 5 : Neraca	56
Gambar 6 : Dokumen	59
Gambar 7 : Kuitansi	60
Gambar 8 : Laporan Realisasi Pendapatan.....	63
Gambar 9 : Dokumentasi Wawancara.....	67
Gambar 10 : Dokumentasi Selisih Pembukuan.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Sebagai wujud pertanggungjawaban daerah atas otonomi pengelolaan keuangan daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan kemampuannya dalam menyusun suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam paket Undang - Undang tentang Keuangan Negara, yakni Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan *good governance*. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Otonomi daerah yang saat ini tengah bergulir di Indonesia merupakan implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut :

“Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan asas otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai”.

Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya masalah penganggaran.

Menurut Sabarno (2008:15) menyatakan bahwa:

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan ke dalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah hingga akuntabilitas pemerintahan daerah, selain itu mendorong penegasan kembali peranan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan mengenai adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sabarno (2008:7) mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian kewenangan ini disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi daerah yang bersifat luas tersebut telah diberikan kepada pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good governance*. Disisi lain tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi tidak terkecuali akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2004:29) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya lebih jauh. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu, *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*. *Good Governance* sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran. Masalah yang seringkali terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan

answerability. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara eksternal. Adapun kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*elected officials*). Artinya bahwa penyajian laporan keuangan harus lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut, bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal atau aparat yang berkepetingan seperti inspektorat atau BPK, akan tetapi menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek teoretis, praktis dan regulasi sebagai berikut :

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2. Bagi akademisi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah daerah adalah untuk memberikan kontribusi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapai sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelolah keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu : *transparansi, akuntabilitas dan partisipatif* (Renyowijoyo, 2008:216).

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut

pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Berdasarkan pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintahan daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai dengan Undang - Undang 1945.

b. Ruang lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang - Undang No. 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Abdul Halim (2002:7) mengemukakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- 3) Penerimaan daerah,
- 4) Pengeluaran daerah,
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330). Penyelenggaraan fungsi pemerintah

daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna

anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4) Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mardiasmo (2000 : 3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

- a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*);
- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
- d) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
- e) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
- f) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
- g) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- h) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat

guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;

- j) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi

d. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip - prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain.

1) Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) *Value of Money*

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas

tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdayaguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas, dkk (1989 : 279-280) adalah sebagai berikut :

1) Tanggung jawab (*accountability*).

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.

2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

(3) Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

(4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

(5) Pengendalian.

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

e. Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4, azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan pengertian tentang azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.
- 4) Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu.
- 5) Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 6) Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 7) Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 8) Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9) Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

10) Manfaat adalah untuk masyarakat bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas administrasi merupakan aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen merupakan suatu mekanisme untuk bisa menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Polidano (1998:62) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas administrasi, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan

dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).

- b. Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new publicmanagement*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggungjawaban dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan

penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas Keuangan

Menurut LAN dan BPKP (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary dalam LAN dan BPKP (2000), *'Accountability is required or expected to give an explanation for one action'*, dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh tanggungjawab dan kewenangannya. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) ditentukan antara lain oleh *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency*, *effectiveness*, *strategic vision*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan

yang baik menurut *United Nations Development Programme*(UNDP) dan World Bank.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks entitas pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pengungkapan dan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintahpusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola APBD, dan dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam hal ini, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola APBD, (2) menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, (3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, (4) melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, (5) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas: (1) menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya, (2) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, (3) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, (4) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, (5) mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, (6) mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, dan (7) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah yang dipimpinnya.

Jika disederhanakan, sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta laporan dan pertanggungjawaban. Dan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, maka seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut

antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna mencari faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Penelitian yang telah Kurnia (2013) dengan menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Soleha, Nurhayati (2014) menganalisis pengaruh implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Metode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap

akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Hendri (2016) tentang determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja operasional daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawatengah dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari status daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anandita (2015) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintahan kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Akuntabilitas Laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik dan memadai. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dan memiliki hubungan yang kuat. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi

dan meningkatkan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan mutu pengawasan serta dapat memberikan informasi keuangan yang akuntabel yang dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pemahaman tentang berbagai teori diatas, maka peneliti dapat merumuskan defenisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

1. Integritas keuangan adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.
2. Pengungkapan merupakan konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat

pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Akuntabilitas Keuangan	<p>Penyajian dan pengungkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan mencakup semua transaksi yang terjadi; 2) Laporan Keuangan dapat dibandingkan /Andal; 3) Laporan Keuangan bebas dari kesalahan Material; 4) Laporan Keuangan menyajikan Informasi keuangan lengkap; 	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Santoso (2016)
	<p>Integritas Keungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan keuangan menjadi Tolok ukur kebutuhan para pengguna; 2) Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan Lengkap; 3) Pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu; 4) Pelaporan realisasi belanja tepat waktu 		
	Ketaatan pada Peraturan		

	1) Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 2) Laporan Keuangan di review oleh inspektorat 3) Laporan Keuangan diaudit oleh BPK		
--	--	--	--

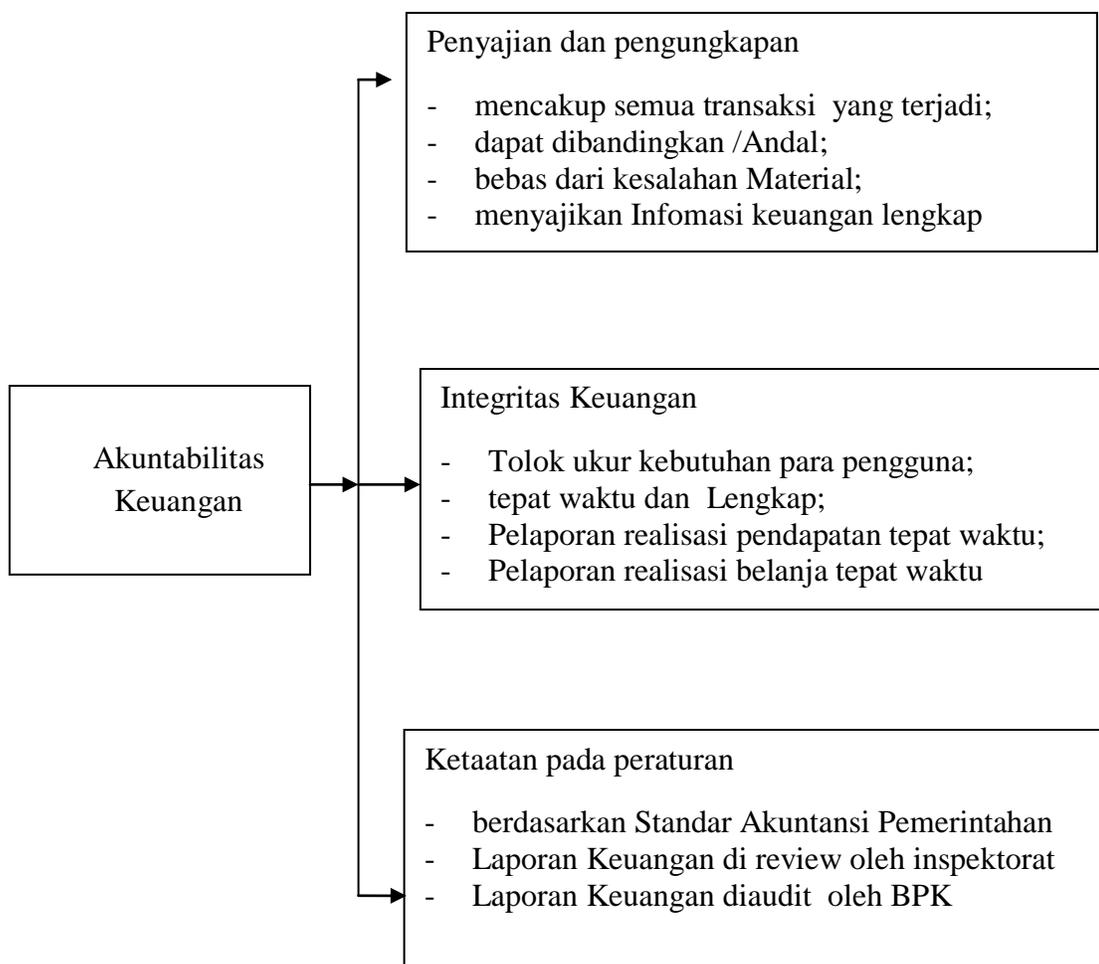
D. Kerangka Pikir

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan. Adapun rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Pikir



Sumber : Santoso (2016) dan Ihyaul Ulum (2010:41)

E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan dari penelitian ini :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu dari segi penyajian dan pengungkapan ?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu dari segi integritas ?

3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu dari segi ketaatan pada peraturan ?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999:12). Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Enrekang.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2017.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yakni penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrument utama dalam pengumpulan data.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 167 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2011:118). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti (Kuncoro, 2014). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Responden penelitian adalah pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Enrekang
2. Responden terdiri dari :
 - a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan 16 orang
 - b. Pejabat penatausahaan keuangan 1 orang
 - c. PPK pejabat pembuat komitmen 1 orang
 - d. Kuasa pengguna anggaran 1 orang
 - e. Pemeriksa hasil pekerjaan 5 orang
 - f. Bendahara dan pembantu bendahara 7 orang
 - g. Pengurus dan penyimpan barang beserta staf keuangan 3 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Enrekang yang memenuhi kriteria sampel.
2. Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi, angket dan dokumen laporan keuangan merupakan sumber data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulant ersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu system akuntansi

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas keuangan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada sampel.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut Riduwan (2002:2) kelebihan dari model tertutup adalah responden mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam pemberian kode dan responden tidak perlu menulis lebih banyak. Penelitian ini menggunakan skala *likert* satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari 1 (Sangat tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan data dalam bentuk tabulasi data sehingga lebih bermakna dan lebih mudah dipahami, untuk dapat melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada RSUD Massenrempulu.

2. Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan setelah dilakukan pengumpulan data-data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, sehingga didapatkan penilaian-penilaian sesuai dengan skala yang digunakan yaitu skala rating atau

rating scale. Skala rating digunakan untuk mendapatkan data kualitatif dari data kuantitatif yakni berupa angka-angka yang telah ditafsirkan. Sedangkan informasi hasil wawancara dan observasi akan digunakan sebagai bahan penunjang dalam penggambaran hasil analisis data kuantitatif dari kuesioner.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$P = F/n \times 100\% \text{ di mana : } P = \text{Persentase}$$

F = Frekuensi

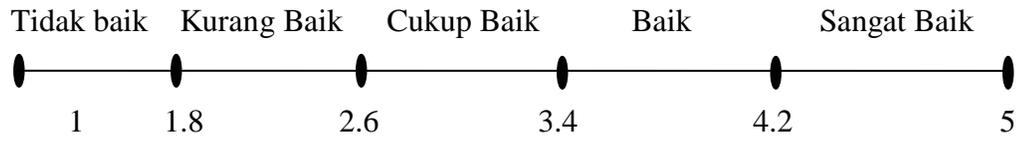
N = Jumlah responden

Untuk mendapatkan nilai/scoring maka digunakan rumus $S \times F$, di mana F adalah Frekuensi dan S adalah Skor jawaban, di mana terlihat pada tabel.

Tabel 2
Skala pengukuran kualitas akuntabilitas keuangan menggunakan Skala Likert

No	Ukuran Responden	Skor
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Cukup Baik	3
4	Kurang Baik	2
5	Tidak Baik	1

Jika dalam bentuk interval, maka terlihat sebagaimana berikut :



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Kabupaten Enrekang

Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten di Sulawesi Selatan berdasarkan Undang Undang No. 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang.

Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 km di sebelah Utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ} 50' 0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 6'330''$ Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 Meter di atas permukaan laut. Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar 1.786,01 Km² atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah ± 2.83 % dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 237.850 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 121.776 jiwa (51,20%) dan perempuan sebanyak 116.074 jiwa (48,80%) yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 133 jiwa/ Km².

Saat ini Pemerintahan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh Drs. Muslimin Bando, M.Pd selaku Bupati dan M. Amiruddin, SH sebagai Wakil Bupati Enrekang. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten

Enrekang untuk lima tahun ke depan (2014-2018) telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Enrekang. Adapun Visi Kabupaten Enrekang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah: “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”. Pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum (jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, Irigasi/sumber air pertanian, listrik dan telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih

baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat.

- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan meningkatnya kinerja pelayanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.
- d. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi Sumber daya alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta

keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrempulu

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrempulu Kabupaten Enrekang dengan kualifikasi rumah sakit kelas C terletak di atas tanah seluas 21.870 m² dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini seluas 9.418 m² terdiri dari 150 tempat tidur.

RSUD Massenrempulu sebagai lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang di bidang pelayanan kesehatan merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Enrekang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan, maka Rumah Sakit Umum Massenrempulu harus dengan seksama memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yaitu "Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan". Dengan memperhatikan agenda pembangunan tersebut dan untuk mendukung rencana pembangunan kesehatan, dan juga mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan maka ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Falsafah Rumah Sakit Umum Massenrempulu :

a. Visi RSUD Massenrempulu

"Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menuju Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera"

b. *Misi RSUD Massenrempulu*

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan di Rumah Sakit.

c. Motto : Kesembuhan Dan Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami

d. Falsafah : Hidup Sehat, Terawat, Penuh Manfaat

e. Nilai (Janji Layanan)

Tata nilai yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan tertuang dalam *JANJI LAYANAN RSUD MASSENREMPULU* :

M = Mutu dan kualitas layanan diutamakan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

A = Arif, inovatif, kreatif dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas

S = Sopan dan Santun berperilaku tanpa membedakan status sosial

P = Profesionalisme berdasarkan kompetensi, jabatan dan keahlian

U = Ulet dan disiplin dalam melaksanakan tugas pelayanan

L = Loyal dalam pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat

B. Karakteristik Responden

Jumlah pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 orang yang ditemui selama kurang lebih satu bulan lamanya penelitian. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden

dapat diidentifikasi karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan golongan.

Secara rinci karakteristik responden atau pegawai pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 responden (61,76%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 responden (38,24%).

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	21	61,76%
Perempuan	13	38,24%
Total	34	100%

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

2. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 36-45 tahun yaitu sebanyak 12 responden (35,29%), dilanjutkan dengan umur antara 26-35 tahun sebanyak 16 responden (47,06%), serta berumur lebih dari 45 tahun sebanyak 6 responden (17,65%) Sedangkan, responden yang berumur kurang dari 25 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<25	-	-
26-35	16	47,06 %
36-45	12	35,29 %
45>	6	17,65 %

Total	34	100 %
--------------	-----------	--------------

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

3. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 19 responden (55,88%), pendidikan S-2 sebanyak 1 responden (2,94%), pendidikan D-3 sebanyak 12 responden (35,3%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMU/SMK 2 responden (5,88%), S-3 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMU/SMK	2	5,88 %
D-3	12	35,3 %
S-1	19	55,88%
S-2	1	2,94%
S-3	-	-
Total	34	100 %

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

4. Pangkat / golongan

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini terdiri dari golongan III dengan jumlah responden 17 (50 %), golongan IV dengan 3 responden (8,82%) serta golongan II dengan 14 responden (41,18%)

Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
IV	3	8,82%
III	17	50%
II	14	41,18%
Total	34	100 %

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

C. Deskripsi Data dan Analisis Data

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Adapun hasil penelitian berdasarkan kuesioner dapat dilihat berikut ini :

1. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan merupakan konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Indikator sub variabel penyajian dan pengungkapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan mencakup semua transaksi yang terjadi, laporan keuangan dapat dibandingkan /andal, laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan laporan keuangan menyajikan informasi keuangan lengkap. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Mencakup Semua Transaksi Yang Terjadi

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	16	47,06 %	80	145 / 34 = 4,26 (Sangat Baik)
Setuju	4	11	32.35%	44	
Cukup Setuju	3	7	20.59 %	21	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	145	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 16 orang responden atau 47,06% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 11 orang responden atau 32,35%, serta responden yang memilih cukup setuju sebanyak 7 orang responden atau 20.59% dan kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai laporan keuangan mencakup semua transaksi yang terjadi pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,26.

Tabel 8
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Dapat Dibandingkan /Andal

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	10	29,41 %	50	139 / 34 = 4,08 (Baik)
Setuju	4	17	50%	68	
Cukup Setuju	3	7	20.59%	21	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	139	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 10 orang responden atau 29,41% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 17 orang responden atau 50%, serta responden yang memilih cukup setuju sebanyak 7 orang responden atau 20.59% dan kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai Laporan Keuangan dapat dibandingkan /Andal pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,08.

Tabel 9
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Bebas Dari Kesalahan Material

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	11	32,35 %	55	136 / 34= 4,00 (Baik)
Setuju	4	13	38,24%	52	
Cukup Setuju	3	9	26,47	27	
Kurang Setuju	2	1	2,94	2	
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	136	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 11 orang responden atau 32,35% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 13 orang responden atau 38,24%, serta responden yang memilih cukup setuju sebanyak 9 orang responden atau 26.47% dan kurang setuju sebanyak 2 orang responden atau 2,94% dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai Laporan Keuangan bebas dari kesalahan Material pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,00.

Tabel 10
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Menyajikan Infomasi Keuangan Lengkap

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	13	38,23 %	65	140 / 34 = 4,11 (Baik)
Setuju	4	12	35,3%	48	
Cukup Setuju	3	9	26,47 %	27	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	140	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 13 orang responden atau 38,23% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 12 orang responden atau 35,3%, serta responden yang memilih cukup setuju sebanyak 9 orang responden atau 26.47% dan kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden laporan keuangan menyajikan informasi keuangan lengkap pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,11.

Tabel 11
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Penyajian dan Pengungkapan

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Laporan keuangan dibuat mencakup semua transaksi yang terjadi.	4,26	Sangat Baik
2	Laporan keuangan disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, netralitas serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau pelaporan lain.	4,08	Baik
3	Laporan keuangan yang dibuat bebas dari	4,00	Baik

	kelalaian dan kekesalahan material dalam mencantumkan informasi		
4	Laporan keuangan yang dibuat menyajikan informasi keuangan yang lengkap	4,11	Baik
Jumlah		16,45	
16,45 / 4 = 4, 11 (Sangat Baik)			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 11 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel penyajian dan pengungkapan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang sebagai indikator keberhasilan akuntabilitas keuangan adalah sebesar 4,11. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel penyajian dan pengungkapan termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 34 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Ada beberapa aspek yang dapat dilihat berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan suatu organisasi, salah satu aspeknya yaitu aspek finansial. Ketika diukur dalam aspek finansial maka ini akan berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga akan berkaitan dengan kemandirian dan kemampuan suatu organisasi. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk membuat dan melaporkan hasil kerja keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga sangat berguna untuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berikut disajikan laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pengguna laporan keuangan RSUD Maseenrempulu, sebagai berikut :

Gambar 2
Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No.	URAIAN	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	18,531,247,500.00	15,383,610,409.00	83.01	11,891,131,549.00
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jumlah PAD	18,531,247,500.00	15,383,610,409.00	83.01	0.00
7					
8	JUMLAH PENDAPATAN	18,531,247,500.00	15,383,610,409.00	83.01	0.00
9					
10	BELANJA				
11	BELANJA OPERASI				
12	Belanja Pegawai	12,919,443,472.00	12,559,324,011.00	97.21	11,262,521,613.00
13	Belanja Barang dan Jasa	24,035,608,585.00	19,318,057,941.45	80.37	23,892,215,583.00
14	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	37,334,234,208.00
15	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Belanja Bansos	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Jumlah Belanja Operasi	36,955,052,057.00	31,877,381,952.45	86.28	0.00
19					
20	BELANJA MODAL				
21	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Belanja Peralatan dan Mesin	10,435,757,500.00	8,674,573,611.00	83.12	967,407,000.00
23	Belanja Gedung dan Bangunan	58,650,000.00	56,550,000.00	96.42	1,072,530,000.00
24	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80,468,000.00	76,850,000.00	95.50	139,600,000.00
25	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Jumlah Belanja Modal	10,574,875,500.00	8,807,973,611.00	83.29	2,179,537,000.00
28					
29	JUMLAH BELANJA	47,529,927,557.00	40,685,355,563.45	85.80	25,643,142,657.00
30					
31	SURPLUS/DEFISIT	(28,996,680,057.00)	(25,301,745,154.45)	87.25	(25,643,142,657.00)

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Laporan Realisasi Anggaran tersebut merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pada gambar diatas tersebut juga dapat diidentifikasi bahwa RSUD Massenempulu telah menyajikan laporan realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu, dimana pada gambar terlihat bahwa laporan realisasi anggaran 2016 telah dilaporkan dengan tepat waktu yaitu 31 Desember 2016.

Gambar 3
Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			
No	URAIAN	2016	2015
1	EKUITAS AWAL	39,780,720,088.00	68,714,095,406.00
2	SURPLUS/DEFISIT L.O	(17,423,308,292.45)	(26,971,102,414.00)
3	RK PPKD	24,085,768,873.00	25,643,142,657.00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(2,003,139,189.00)	0.00
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
7	LAIN LAIN	(2,003,139,189.00)	(25,783,520,044.00)
8	EKUITAS AKHIR	44,420,041,487.55	39,780,720,088.00

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pada laporan ekuitas diatas meski tidak terisi pada tahun sebelumnya namun perubahan modal tersebut dapat dibandingkan pada modal awal yang merupakan modal akhir 2015 dengan modal akhir 2016.

Selanjutnya adalah laporan operasional, Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut adalah gambar laporan operasional RSUD Massenrempulu periode 2016 :

Gambar 4
Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
1.02.02.00 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No.	URAIAN	2016	2015
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	18,754,075,036.00	15,236,868,632.00
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	18,754,075,036.00	15,236,868,632.00
7			
8	BEBAN		
9	BEBAN OPERASI	36,177,383,328.45	0.00
10	Beban Pegawai	12,559,324,011.00	10,530,127,813.00
11	Beban Barang dan Jasa	10,138,076,899.45	23,467,444,395.00
12	Beban Bunga	0.00	0.00
13	Beban Subsidi	0.00	0.00
14	Beban Hibah	0.00	0.00
15	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00
16	Beban Penyusutan	7,476,982,418.00	6,432,001,683.00
17	Beban Lain-lain	3,000,000.00	1,788,397,355.00
18	Jumlah Beban Operasi	36,177,383,328.45	42,207,971,046.00
19			
20	JUMLAH BEBAN	36,177,383,328.45	42,207,971,046.00
21			
22	SURPLUS/DEFISIT - LO	(17,423,308,292.45)	(26,971,102,414.00)

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Gambar 5
Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			
No.	URAIAN	2016	2015
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	263,506,067.55	1,479,462,349.00
5	Kas di Bendahara Penorimsan	0.00	0.00
6	Piutang Pajak	0.00	0.00
7	Piutang Retribusi	3,370,464,627.00	3,547,237,083.00
8	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
9	Beban di Bayar di muka	5,244,000.00	0.00
10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
11	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0.00	0.00
12	Piutang Lainnya	0.00	0.00
13	Persediaan	5,123,590,627.00	1,594,551,515.00
14	Jumlah Aset Lancar	8,762,805,321.55	6,921,270,947.00
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00
18	Peralatan dan Mesin	40,655,170,786.00	33,642,658,608.00
19	Gedung dan Bangunan	19,930,336,424.00	19,887,686,424.00
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	474,710,829.00	443,215,229.00
21	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,589,082,400.00	1,589,082,400.00
23	Akumulasi Penyusutan	(37,230,580,441.00)	(29,761,298,903.00)
24	Jumlah Aset Tetap	34,598,719,996.00	34,981,343,758.00
25			
26	ASET LAINNYA		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
28	Tuntutan Ganti Kerugian	0.00	0.00
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
30	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00
31	Aset Lain-Lain	1,423,519,128.00	0.00
32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7,700,880.00)	0.00
33	Jumlah Aset Lainnya	1,415,818,248.00	0.00
34			
35	JUMLAH ASET	44,777,343,567.55	41,602,614,705.00
36			
37	KEWAJIBAN		
38			
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	0.00
41	Pendapatan Diterima Dimuka	3,000,000.00	1,480,982,349.00
42	Utang Belanja	0.00	0.00
43	Utang Jangka Pendek Lainnya	354,302,070.00	360,912,270.00
44	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	357,302,070.00	1,841,894,619.00
45	JUMLAH KEWAJIBAN	357,302,070.00	1,841,894,619.00
46			

No.	URAIAN	2016	2015
47	EKUITAS		
48			
49	EKUITAS		
50	Ekuitas	44,420,041,497.55	39,760,720,086.00
51	JUMLAH EKUITAS	44,420,041,497.55	39,760,720,086.00
52			
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	44,777,343,567.55	41,602,614,705.00

Sumber : Laporan Keuangan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Neraca diatas merupakan laporan ngan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Integritas Keuangan

Integritas keuangan adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.

Indikator sub variabel integritas keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan menjadi tolok ukur kebutuhan para pengguna, penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap, pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu dan pelaporan realisasi belanja tepat waktu. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 12
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Menjadi Tolok Ukur Kebutuhan Para Pengguna

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	11	32,35 %	55	142 / 34 = 4,17 (Sangat Baik)
Setuju	4	18	52,94%	72	
Cukup Setuju	3	5	14,71%	15	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	142	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 11 orang responden atau 32,35% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 18 orang responden atau 52,94%, serta responden yang memilih cukup setuju 5 orang responden atau 14,71%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat

dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai laporan keuangan menjadi tolok ukur kebutuhan para pengguna pada pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,17.

Indikator selanjutnya integritas keuangan adalah penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap, Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 13
Pernyataan Responden Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Lengkap

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	8	23,53%	40	133 / 34 = 3,91 (Baik)
Setuju	4	15	44,12%	60	
Cukup Setuju	3	11	32,35%	33	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	133	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 8 orang responden atau 23,53% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 15 orang responden atau 44,12%, serta responden yang memilih cukup setuju 11 orang responden atau 32.35%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,91.

Mengenai pernyataan indikator kedua mengenai laporan keuangan lengkap dan tepat waktu seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas telah dilampirkan pada gambar diatas pada pembahasan penyajian dan pengungkapan, dapat kita lihat bahwa laporan tersebut telah lengkap dan tepat waktu pada akhir tahun 2016 telah dilaporkan. Berikut dilampirkan gambar kuitansi dan beberapa dokumen sebagai bukti kelengkapan laporan keuangan :

Gambar 6
Dokumen



Sumber : Bendahara Pengeluaran RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Gambar 7
Kuitansi

T.A. : 2016
NOMOR :
MAK : 5.2.2.03.30

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum
Massenrempulu Kabupaten Enrekang

Jumlah Uang : Rp 10.944.500,00

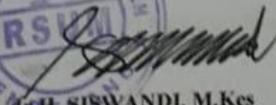
Terbilang : SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT
RIBU LIMA RATUS RUPIAH

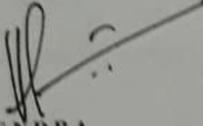
Untuk Pembayaran : Biaya Pekerjaan Perawatan Bak Control Instalasi Pengolahan Limbah RS
pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu untuk Triwulan III T.A. 2016
sesuai Surat Perintah Kerja Tanggal
07 Oktober 2016 Nomor : 021/SPK-PRBIPLRS/RSUM/X/2016
dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana terlampir.

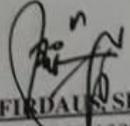
Enrekang, 2016

Yang Mengirim

CV 117 MAKMUR

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

G. H. SISWANDI, M.Kes
NIP. 19641218 199903 1 001

Lunas dibayar, Tanggal 15/11/16
Bendahara Pengeluaran

HENDRA
NIP. 19811210 200701 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

FIRDAUS, SKM
NIP. 19631231 198903 1 217


TANGGAL : 15/11/16
NO. BUKU : 1242
PARAF : <

Sumber : Bendahara Pengeluaran RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Tabel 14

Pernyataan Responden Mengenai Pelaporan Realisasi Pendapatan Tepat Waktu

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	7	20,59 %	35	128 / 34 = 3,76 (Baik)
Setuju	4	15	44,12%	60	
Cukup Setuju	3	9	26,47%	27	
Kurang Setuju	2	3	8,82%	6	
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	128	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 7 orang responden atau 20,59% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 15 orang responden atau 44,12%, serta responden yang memilih cukup setuju sebanyak 9 orang atau 26,47%, kurang setuju sebanyak 3 orang responden atau 8,82% dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,76.

Tabel 15

Pernyataan Responden Mengenai Pelaporan Realisasi Belanja Tepat Waktu

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	6	17,65 %	30	123 / 34 = 3,62 (Baik)
Setuju	4	15	44,12%	60	
Cukup Setuju	3	13	38,23%	33	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	123	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 6 orang responden atau 17,65% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 15 orang responden atau 44,12%, serta responden yang memilih cukup setuju 13 orang responden atau 38,23%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pelaporan realisasi belanja tepat waktu pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,62. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 34 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun laporan realisasi penerimaan RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 8 Laporan Realisasi Pendapatan

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN
RUMAH SAKIT UMUM MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG

NO REK	U R A I A N	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.531.247.500			
	- Uang UGD	60.000.000	104.111.000	(44.111.000)	173,52
	- Uang Apotik	200.000.000	365.614.680	(165.614.680)	182,81
	- Uang Persalinan	50.000.000	62.321.500	(12.321.500)	124,64
	- Uang Rawat Inap Perawatan Interna Utara	120.000.000	168.321.000	(48.321.000)	140,27
	- Uang Rawat Inap Perawatan Interna Selatan	100.000.000	142.097.000	(42.097.000)	142,10
	- Uang Rawat Inap Perawatan Bedah	63.000.000	112.472.000	(49.472.000)	178,53
	- Uang Rawat Inap Perawatan Anak	60.000.000	94.449.000	(34.449.000)	157,42
	- Uang Rawat Inap Perawatan Nipas	45.000.000	127.541.000	(82.541.000)	283,42
	- Uang Rawat Inap Perinatologi	50.000.000	115.312.500	(65.312.500)	230,63
	- Uang I C U	30.500.000	60.011.000	(29.511.000)	196,76
	- Keterangan Berbasan Schat/Bebas Narkoba	40.000.000	60.000.000	(20.000.000)	150,00
	- Uang laboratorium	250.000.000	354.941.000	(104.941.000)	141,98
	- Uang Ambulance	2.000.000	211.600	1.788.400	10,58
	- Uang Fisioterapi	4.000.000	7.989.000	(3.989.000)	199,73
	- Uang Radiologi	65.000.000	110.995.000	(45.995.000)	170,76
	- Uang OK	70.000.000	129.060.000	(59.060.000)	184,37
	- Uang Polik Bedah	5.750.000	9.410.000	(3.660.000)	163,65
	- Uang Polik Interna	18.000.000	28.350.000	(10.350.000)	157,50
	- Uang Polik Anak	1.000.000	3.344.000	(2.344.000)	334,40
	- Uang Polik Keb/Kandungan	2.000.000	4.420.000	(2.420.000)	221,00
	- Uang Polik Umum	5.000.000	8.280.000	(3.280.000)	165,60
	- Uang Polik THT	20.000.000	35.334.000	(15.334.000)	176,67
	- Uang Polik Gigi	5.000.000	7.484.000	(2.484.000)	149,68
	- Uang Polik Mata	1.000.000	-	1.000.000	0,00
	- Uang Poli Jiwa	7.000.000	9.970.000	(2.970.000)	142,43
	- Uang Polik Kulit & Kelamin	1.000.000	-	1.000.000	0,00
	- Uang Poli Saraf	20.000.000	26.832.000	(6.832.000)	134,16
	- Uang EKG	20.000.000	23.000.000	(3.000.000)	115,00
	- Uang USG	4.000.000	6.800.000	(2.800.000)	170,00
	- Jasa Pelayanan U T D R S	17.000.000	29.950.000	(12.950.000)	176,18
	- Uang Visum Et Revertum	500.000	450.000	50.000	90,00
	- Uang Perawatan Jenazah	100.000	-	100.000	0,00
	- Uang Instalasi Gizi	45.000.000	63.529.000	(18.529.000)	141,18
	- Uang Laundry	2.000.000	2.939.000	(939.000)	146,95
	- JKN	17.000.000.000	13.000.000.000	4.000.000.000	76,47
	- Jasa Giro JKN 2015	70.000.000	37.673.629	32.326.371	53,82
	- Setoran INHEALT 2015	12.397.500	12.397.500	-	100,00
	- Setoran Biaya Keamanan ATM BNI	6.000.000	6.000.000	-	100,00
	- Setoran Biaya Keamanan ATM BRI	10.000.000	10.000.000	-	100,00
4.1.2.02.01	- Sewa Ruangan/Apotik Massenrempulu	5.000.000	-	5.000.000	0,00
	- Sewa Kontribusi Dokter Radiologi	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	- Sewa Kantin (3 Ruang)	9.000.000	6.000.000	3.000.000	66,67
	- Sewa Tanah ATM BNI	3.000.000	3.000.000	-	100,00
	- Sewa Tanah ATM BRI	3.000.000	3.000.000	-	100,00
4.1.2.02.05	- Retribusi Parkir	24.000.000	25.000.000	(1.000.000)	104,17
	J U M L A H	18.531.247.500	15.383.610.409	3.147.637.091	83,01

Sumber : Bendahara Penerimaan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Tabel 16
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Integritas Keuangan

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Laporan keuangan menjadi tolak ukur kebutuhan para pengguna	4,17	Sangat Baik
2	Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap	3,91	Baik
3	Pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu	3,76	Baik
4	Pelaporan realisasi belanja tepat waktu	3,62	Baik
Jumlah		15,46	
15,46 / 4 = 3, 86 (Baik)			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 16 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel integritas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang sebagai indikator keberhasilan akuntabilitas keuangan adalah sebesar 3,86. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel integritas keuangan termasuk dalam interval baik.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Indikator sub variabel ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan Pemerintah Daerah di review oleh inspektorat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

diaudit oleh BPK. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 17
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	15	44,12 %	75	146 / 34 = 4,29 (Baik)
Setuju	4	14	41,18%	56	
Cukup Setuju	3	5	14,7%	15	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	146	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 15 orang responden atau 44,12% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 14 orang responden atau 41,18%, serta responden yang memilih cukup setuju 5 orang responden atau 14,7%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,29.

Senada dengan pernyataan Kepala sub bagian (PPK) Syaifullah, SE dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan bahwa :

Laporan keuangan pada RSUD Massenrempulu disusun berdasarkan PP 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

Tabel 18
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Review Oleh Inspektorat

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	16	47,06 %	80	149/ 34 = 4,38 (Sangat Baik)
Setuju	4	15	44,12%	60	
Netral	3	3	8,82%	9	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	149	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 16 orang responden atau 47,06% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 15 orang responden atau 44,12%, serta responden yang memilih cukup setuju 3 orang responden atau 8,82%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah di review oleh inspektorat pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,38. Adapaun pernyataan Kepala sub bagian (PPK) Syaifullah, SE mengenai review laporan keuangan dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan bahwa :

Laporan keuangan direview oleh inspektorat, dimana hal-hal yang direview menyangkut pendapatan, belanja, beban, aset, utang dan ekuitas.

Berikut dokumentasi wawancara pada inspektorat Kabupaten Enrekang

Gambar 9
Dokumentasi Wawancara



Sumber : Ibu Neni Inspektorat Kabupaten Enrekang 2016

Adapun hal-hal yang direview mengenai laporan keuangan yaitu :
Memperbaiki laporan apabila terjadi kesalahan administrasi, dan melakukan pengembalian apabila terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran

Gambar 10
Dokumen Selisih Pembukuan



SURAT PERNYATAAN DAN PENJELASAN SELISIH PEMBUKUAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 30 Desember 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H E N D R A
NIP : 19811210 200701 1 004
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Menyatakan bahwa terdapat selisih perhitungan atas saldo akhir kas per 30 Desember 2016 sebesar **Rp 32,45 (Tiga Puluh Dua Koma Empat Puluh Lima)** berdasarkan Register SP2D, saldo akhir BKU, saldo akhir R/C, dan nilai fisik uang seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. Selisih yang diperoleh telah memperhitungkan komponen-komponen lain dengan rincian terlampir.

Atas selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Karena Kesulitan Uang Receh

Demikian pernyataan dan penjelasan selisih perhitungan atas saldo akhir kas per 30 Desember 2016 ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Lampir
Mengetahui,
Pengeluaran,
Direktur RSUD Massenrempulu

Enrekang, 30 Desember 2016
Bendahara

(dr. H. SISWANDI, M.Kes)
NIP. 19641218 199903 1 001

(H E N D R A)
NIP. 19811210 200701 1 004

Sumber : Bendahara Pengeluaran RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang 2016

Bahwa review dilakukan Inspektorat salah satu contoh terdapat pada gambar diatas yang mengungkapkan tentang adanya selisih pembukuan.

Tabel 19
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Diaudit oleh BPK

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	18	52,94 %	90	151 / 34 = 4,44 (Sangat Baik)
Setuju	4	13	38,24%	52	
Cukup Setuju	3	3	8,82%	9	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
Jumlah		34	100%	151	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden, 18 orang responden atau 52,94% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 13 orang responden atau 38,24%, serta responden yang memilih cukup setuju 3 orang responden atau 8,82%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,44.

BPK mengaudit laporan keuangan periode 2016 pada bulan maret 2017, dan yang diaudit pertama adalah Asset. Dari hasil audit BPK terjadi selisih sehingga pengurus barang dan penyimpan barang diharapkan mencari selisihnya.

Tabel 20
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Ketaatan
terhadap Peraturan Perundang-undangan

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan	4,29	Baik
2	Laporan keuangan di review oleh	4,38	Sangat Baik

	Inspektorat		
3	Laporan keuangan diaudit oleh BPK	4,44	Sangat Baik
Jumlah		13,11	
13,11 / 3 = 4,37 (Sangat Baik)			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 20 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang sebagai indikator keberhasilan akuntabilitas keuangan adalah sebesar 4,37. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 34 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

4. Deskripsi Hasil Penelitian Akuntabilitas Keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang berdasarkan sub variabel penyajian dan pengungkapan, integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada rekapitulasi pernyataan responden sebagai berikut :

Tabel 21
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas Keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang

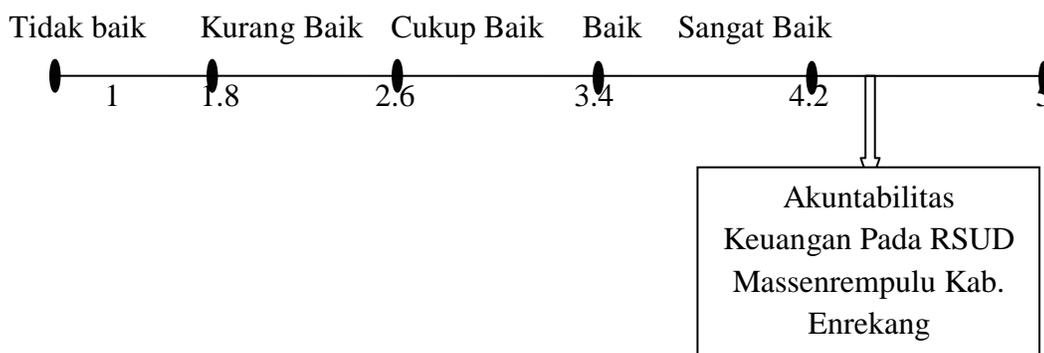
NO	Sub Variabel Akuntabilitas Keuangan	Nilai Rata - rata Total Skor	Keterangan
1	Penyajian dan pengungkapan	4,11	Sangat Baik
2	Integritas Keuangan	3,86	Baik
3	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang –	4,37	Sangat Baik

Undangan	
Jumlah	12,34
Nilai Rata - rata	$12,34/3 = 4,11$ (Sangat Baik)

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Dari tabel 21 dapat dilihat bahwa sub variabel penyjian dan pengungkapan masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,11, sub variabel integritas keuangan dengan nilai 3,86 termasuk dalam kategori baik dan sub variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang –Undangan termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,37. Penilaian baik pada ketiga sub variabel tersebut sesuai dengan jawaban responden atas pernyataan yang diberikan, dimana item pernyataan tersebut diadopsi dari indikator akuntabilitas keuangan itu sendiri yang terdiri dari tiap sub variabel yang dikembangkan kedalam beberapa pernyataan.

Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan nilai rata –rata keseluruhan sub variabel akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang sebesar 4,11. Sesuai dengan rentang interval yang ditentukan sebelumnya, maka akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang dapat dilihat pada rentang interval di bawah ini :



Secara umum dijelaskan dari analisis diatas bahwa akuntabilitas keuangan Pada RSUD Massenrempulu Kab. Enrekang sangat baik.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian Akuntabilitas Keuangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh tanggungjawab dan kewenangannya. Terdapat tiga sub variabel akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berikut dijelaskan hasil penelitian berdasarkan ketiga sub variabel tersebut yaitu :

1. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan merupakan konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi tertentu untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Adapun indikator penyajian dan pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah laporan keuangan mencakup semua transaksi yang terjadi, laporan keuangan dapat dibandingkan /andal, laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan laporan keuangan menyajikan informasi keuangan lengkap Berdasarkan rekapitulasi penilaian responden diperoleh sub variabel penyajian dan pengungkapan termasuk dalam kategori sangat baik. Berarti bahwa akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu telah menyajiakan dan mengungkapkan laporan keuangan dengan sangat baik sesuai dengan jawaban responden dalam penelitian ini.

2. Integritas Keuangan

Integritas keuangan adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.

Adapun indikator integritas keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan menjadi tolok ukur kebutuhan para pengguna, penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap, pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu dan pelaporan realisasi belanja tepat waktu. Berdasarkan rekapitulasi penilaian responden diperoleh sub variabel integritas keuangan termasuk dalam kategori baik. Berarti bahwa integritas keuangan sebagai salah satu sub variabel akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu yang diteliti berdasarkan indikator diatas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tanggapan responden dalam penelitian ini.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun indikator ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan Pemerintah Daerah di review oleh inspektorat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK. Berdasarkan rekapitulasi penilaian responden diperoleh sub variabel ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam kategori sangat baik. Berarti bahwa ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada RSUD Massenrempulu dalam menyusun laporan keuangan telah dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan tanggapan responden dalam penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan akuntabilitas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang berada pada kategori sangat baik sesuai dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyajian dan Pengungkapan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang dengan nilai rata-rata 4,11 termasuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dimana laporan keuangan telah mencakup semua transaksi yang terjadi, laporan keuangan dapat dibandingkan /andal, laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan laporan keuangan menyajikan informasi keuangan lengkap.
2. Integritas keuangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang dengan nilai rata-rata 3,86 termasuk dalam kategori baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dimana laporan keuangan menjadi tolok ukur kebutuhan para pengguna, penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap, pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu dan pelaporan realisasi belanja tepat waktu.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang dengan nilai rata-rata 4,37 termasuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dimana laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan Pemerintah Daerah di review oleh inspektorat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK.

B. Saran

Dengan melihat hasil dan analisa penelitian serta kesimpulan, maka hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah yang melibatkan seluruh pegawai RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang beserta pihak yang berkepentingan dalam rangka mendukung terlaksananya akuntabilitas keuangan yang lebih optimal.
2. Pemanfaatan teknologi informasi agar lebih dioptimalkan dengan cara menyiapkan, membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang handal dan baik serta berkualitas untuk mendukung terlaksananya akuntabilitas keuangan secara maksimal.

3. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia agar dapat menempatkan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan keahliannya masing-masing, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, melakukan pemetaan dan penataan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidangnya, penilaian kinerja yang objektif, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dengan tujuan untuk memacu kinerja dengan demikian diharapkan akuntabilitas keuangan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Indriantoro, Nur. Dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Kuncoro Mudrajad. 2014. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sabarno, Hari.2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Bandung: Sinar Grafika.
- Santoso, Eli B. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

JURNAL

- Erryana dan Hendri. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 1 -14.
- Kurnia, I. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor

Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Skripsi Padang : Universitas Negeri Padang.

Lembaga Administrasi Negara, BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mardiasmo. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 63-82.

Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, No.1, 21 - 34.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sutaryo. 2011. Manajemen Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1. No 2.

Xu, Hongjiang. 2003. Data Quality Issues For Accounting Information Systems Implementation: Systems, Stakeholders, And Organizational Factors. *Journal of Technology Research*, 1-11.

SKRIPSI DAN TESIS

Afriyanti, Dita. 2001. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). *Skripsi*, Semarang; Universitas Diponegoro.

Akbar, Reza Ali. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Tesis*, Jakarta: Fakultas Pendidikan ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anandita, Dita T. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bandung). Skripsi terakreditasi Bandung : Universitas Widyatama.

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis* Medan: Universitas Sumatra Utara.

ATURAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SUMBER INTERNET

COSO. 1992. *Internal Control-Integrated Framework*. www.coso.org (25 Mei 2015).

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu
2. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 01
Kabupaten Enrekang
3. Waktu Pengambilan Dokumen : Tanggal 01 Nopember s/d 15
November 2017

B. Hal – Hal Yang Perlu Diobservasi

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan secara umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
3. Solusi untuk mengatasi kendala laporan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
4. Kelengkapan laporan keuangan yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan, integritas keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai akuntabilitas keuangan pada RSUD Kab. Enrekang ? apabila belum maksimal apa yang menjadi faktor penghambatnya?
2. Apakah laporan keuangan yang dibuat sudah mencakup semua transaksi yang ada?
3. Apakah Laporan keuangan disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, netralitas serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau pelaporan lain?
4. Apakah Laporan keuangan yang dibuat menyajikan informasi keuangan yang lengkap?
5. Apakah Laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi tolak ukur kebutuhan para pengguna?
6. Apakah penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan lengkap?
7. Apakah pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu?
8. Apakah pelaporan realisasi belanja tepat waktu?
9. Apakah laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan? Alasan!
10. Apakah laporan keuangan di review oleh Inspektorat? Apa-apa saja yang direview?
11. Apakah laporan keuangan diaudit oleh BPK? Bagaimana hasil auditnya secara umum ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sumarni S

Tempat/tanggal lahir : Enrekang, 24 Desember 1984

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.3 Enrekang

Status Perkawinan : Kawin

Kantor : Rumah Sakit Umum Massenrempulu

Alamat Instansi : Jl. Jend. Sudirman Keppe

Jabatan : Staf Keuangan dan Asset

Pangkat/Gol : Pengatur / IIc

Nama suami : Syamsu

Nama anak : 1. Rifqie Arzan

Riwayat Pendidikan : 1. SD No. 41 Enrekang tahun 1997
2. SMP Negeri 1 Enrekang Tahun 2000
3. SMA Negeri 1 Enrekang Tahun 2003

Riwayat Pekerjaan : 1. RSUD Massenrempulu mulai Januari 2009 s.d Sekarang